

BAB V

KESIMPULAN

Konflik yang terjadi antara Israel dan negara-negara Arab pada mulanya diawali oleh adanya deklarasi kemerdekaan Israel pada 1948 pasca adanya Mandat Britania, yang kemudian direspon negara-negara Arab dengan serangannya ke Israel. Sejak itulah konflik antara Israel dan Palestina semakin meruncing. Berbagai upaya proses perdamaian sudah dilakukan mulai dari Oslo hingga *Two State Solution*. Namun, hingga saat ini konflik antara Israel dan Palestina belum juga menemukan resolusi yang pas bagi kedua belah pihak.

Sehebat apapun rencana perundingan perdamaian yang dicanangkan tetap tidak akan berhasil apabila kedua belah pihak tetap bersikeras dengan ideologi nya masing-masing dimana partai Likud sebagai partai yang memegang kendali pemerintahan Israel memiliki ideologi *Revisionist Zionis* dengan arah politik yang cenderung konservatif membuat rezim baru Israel cenderung kaku dalam menjalankan proses perundingan damai serta sangat menonjolkan sifat agresifnya karenamenurut mereka perdamaian yang dilakukan dengancara bernegosiasi hanya akan bertahan sebentar saja.

Partai Likud merupakan partai beraliran konservatif yang memiliki pengaruh besar dalam dinamika kehidupan politik di Israel. Paham konservatif Likud berlandaskan atas ideologi *Revisionist Zionisme* mengenai Eretz Yisrael. Orientasi partai Likud adalah pembangunan pemukiman Yahudi dan orientasi pengukuhan Jerusalem sebagai milik Israel sepenuhnya. Partai ini memprioritaskan menjaga keamanan tanah Israel. Partai ini berpandangan bahwa tanah Israel merupakan milik Israel yang tidak

terbagi. Oleh karena itulah mereka tidak menerima keputusan PBB mengenai pembagian wilayah. Partai konservatif Likud membawa perubahan terhadap proses perdamaian Israel-Palestina.

Jika pada masa pemerintahan Partai Buruh menggunakan proses perdamaian dengan menggunakan instrument perundingan maka hal ini tidak berlaku bagi pemerintahan pemerintahan konservatif Likud. Bagi mereka proses perundingan damai tidak akan menguntungkan mereka. Setelah Perdana Menteri Yitzhak Rabin meninggal pada tahun 1995 dan Perdana Menteri Shimon Peres harus meletakkan jabatannya pada tahun 1995, kekuasaan politik di Israel berubah. Naiknya Benyamin Netanyahu dari Partai Likud pada tahun 1996 dan Ariel Sharon pada tahun 2001 mengindikasikan bahwa Israel berada dalam pemerintahan konservatif Likud. Pemerintahan Likud, menganggap bahwa jalur perundingan damai hanya akan memberikan konsesi kepada Palestina. Warga Palestina di wilayah pendudukan akan menghalangi jalannya pembangunan pemukiman Yahudi serta akan mengganggu keamanan nasional Israel.

Oleh karena itu, pemerintahan Likud mengubah landasan *land for peace* menjadi *land for security*. Perubahan landasan ini berdampak pada proses perdamaian. Israel meminimalisasi jalan perundingan damai dengan pihak Palestina. Israel meneruskan pembangunan pemukiman Yahudi di daerah pendudukan. Selain itu, Israel melakukan tindakan radikal dengan menyatakan tidak akan membagi Jerusalem kepada Palestina dan mengklaim bahwa Jerusalem sepenuhnya milik Israel. Bahkan, Ariel Sharon secara radikal membawa pasukannya dan mengunjungi Masjidil Aqsa. Peristiwa inilah yang kemudian memicu terjadinya intifadah kedua atau yang disebut sebagai intifadah Al-Aqsa akhir tahun 1999. Tindakan pemerintahan Likud telah memicu reaksi radikal dari pihak

Palestina. Kelompok radikal muncul dipermukaan dan melakukan tindakan dengan menggunakan instrumen kekerasan seperti penggunaan bom bunuh diri.

Perang atau “*peace through strength*” dijadikan jalan terakhir untuk mencapai karena menurut Likud perdamaian hanyalah “*Imagineable deal*”. Dengan adanya tindakan radikal dari baik dari Israel maupun Palestina, tingkat eskalasi konflik meningkat. Konflik Israel-Palestina kemudian kembali berada dalam tahapan kritis. Kelompok sayap kanan, yang dimotori oleh Partai Likud dan Yisraeli Beitneinu, harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit bagi masa depan Israel. Ancaman masa depan Israel, bukan hanya karena kelompok Hamas di Palestina, tapi kondisi ekonomi Israel yang sekarat akibat krisis global, defisit anggaran dan selama ini ekonomi Israel hanya ditopang oleh bantuan Barat.

Pasca penyerangan yang terjadi di jalur Gaza, banyak negara yang menolak untuk menerima dan menjual produk yang berasal dari Israel. Aksi boikot terhadap produk-produk Israel itu benar telah berdampak, dan mencekik ekonomi Israel. Namun, betapapun Israel sudah menghadapi sekarat secara ekonomi, tapi para pemimpin ultra kanan Israel, tetap saja mereka masih mempunyai ambisi perang yang menggebu-gebu untuk memerangi Palestina. Karena, para pemimpin ultra kanan Israel, tak peduli dengan kondisi ekonomi yang mereka alami. Tentu, bagi Zionis-Israel bisa merebut kembali wilayah Palestina merupakan hal terpenting bagi mereka untuk mendapatkan kembali “*The Promised Land*”.